

**PENGARUH PELAKSANAAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(Studi pada Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat)**

Oleh:

Dais Solihat, Sri Mulyani, Indri Yuliafitri
Universitas Padjadjaran Bandung

Abstract

Government regulation, states that regional finances should be managed on the basis of common principles of orderly, law-abiding, efficiency, economical, effective, transparent and accountable with due regard to the principles of justice, compliance and benefits to society. Therefore, to achieve effectiveness of regional expenditure, government must implementing the internal control.

This research aims to analysis the influences of the implementation of internal control to the effectiveness of revenue and expenditure budget management of six local government in West Java Province.

This research was conducted in Bandung municipal, Cimahi city, Tasikmalaya city, Tasikmalaya municipal, West Bandung municipal, and Bandung city. The data of research is collectible questionnaires with internal auditors as respondents. Spearman rank correlation is used for analysing the data.

The result of this research in this research shows that the implementation of government internal control system is positively related to the effectiveness revenue and expenditure budget management, with the correlation coefficient is 0.816 on significant level is 0.01.

Keyword: *Internal Control and Budget Management Effectiveness of Regional Income and Expenditure.*

PENDAHULUAN

Efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan sangat menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi. Sumber daya keuangan yang terbatas dan kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas mengharuskan pemerintah mengelola keuangannya secara efektif.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan memiliki asas umum yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya (Lamusu, 2013).

Pengendalian internal diterapkan pada organisasi yang berupaya menjaga dan mengarahkan organisasi sesuai dengan tujuan, strategi, serta nilai organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen, dkk (2008) bahwa pengendalian bukan masalah mengetahui dan mengarahkan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, dan menghindari semua kesalahan. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengarahkan perilaku organisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan strategi, tujuan, serta nilai-nilai organisasi. Pengendalian tidak mencegah orang untuk melakukan kesalahan tetapi menciptakan lingkungan yang mendorong mereka agar melakukan hal yang benar.

Sistem pengendalian internal juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya pengendalian internal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, tetapi kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2016, BPK menemukan kasus kelemahan sistem pengendalian intern di 6 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dimana Kab. Bandung 12 kasus, Kab. Bandung Barat 2 kasus, Kab. Tasikmalaya 6 kasus, Kota Cimahi 1 kasus, Kota Bandung 2 kasus dan Kota Tasikmalaya 10 kasus. Serta hasil evaluasi kinerja pencapaian tujuan organisasi di Kab. Tasikmalaya ada 18 dari 57 yang tidak mencapai target. Kota Bandung dari 17 target yang dituju, terdapat 1 yang tidak mencapai target. Kab. Bandung hasil evaluasi kinerja 1 dari 20 target yang tidak mencapai target yang ditentukan. Kota Cimahi, dari 30 target ada 4 target yang tidak tercapai, Kota Tasikmalaya dari 26 target terdapat 2 target yang belum mencapai target. Sedangkan Kab. Bandung Barat penilaian terhadap kinerja pemerintah dari tahun ketahun belum ada kemajuan, masih belum optimal dalam target perencanaan program atau tujuan sasaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan realisasinya seperti, tidak tercapainya target pembangunan sekolah dan infrastruktur sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana hubungan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi :
(a) Lingkungan Pengendalian (b) Penilaian Risiko (c) Kegiatan Pengendalian (d) Informasi dan Komunikasi.

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Menurut Steers dalam Halim (2004) menyatakan bahwa efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil.

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut Abdul Halim (2007) pengertian pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inten Pemerintah dinyatakan bahwa," (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, guber-nur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini".

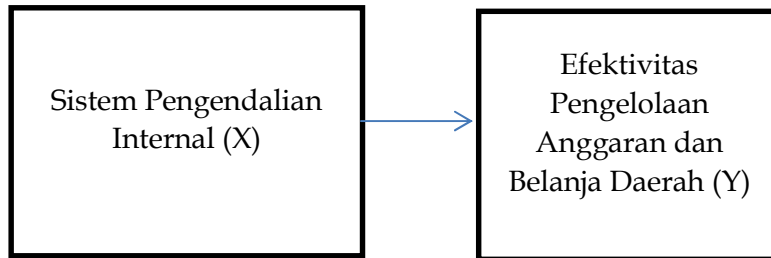
Apabila sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan dengan baik, maka seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah akan berjalan secara efektif, dan efisien. Dengan demikian, penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah bisa dipertanggungjawabkan (Joni Iskandar, 2015).

Apabila sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan, maka keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan terhadap perundang-undangan bisa tercapai sehingga pengelolaan keuangan daerah akan terlaksana secara efektif (Mei Sari Simatupang, 2017).

Gloria, Tinangon, Linda (2017), semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diterapkan maka semakin terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: "Pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif verifikatif dengan menggunakan korelasi *rank spearman* dan *kendall tau test*. Karena sampel dalam penelitian ini hanya enam sampel maka, penelitian ini merupakan penelitian nonparametrik.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diperoleh dengan melakukan:

- a. Studi Lapangan
- b. Studi Kepustakaan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada para internal auditor di masing-masing pemerintah daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat temuan kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak financial

2. Terdapat temuan kasus sistem pengendalian internal yang terdaftar dalam IHPS II Tahun 2016.

OPERASIONAL VARIABEL

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perencanaan, penyusunan rencana kerja keuangan yaitu rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikator dalam perencanaan:
 - a. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - b. Penetapan alokasi yang tepat.
2. Pelaksanaan, melakukan penyusunan anggaran yang sudah direncanakan. Indikator dalam pelaksanaan:
 - a. Pengelolaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun.
 - b. Pengelolaan dilakukan sesuai dengan jadwal dan/atau ketentuan yang sudah direncanakan.
 - c. Tercapainya semua sasaran dan tujuan pemda.
3. Penatausahaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Indikator dalam penatausahaan:
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia yang tepat
 - b. Pengelolaan anggaran yang sesuai dan tepat
 - c. Prinsip-prinsip pengelolaan anggaran
 - d. Mengikuti alur dalam alokasi anggaran.
4. Pelaporan, wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan pengelolaan anggaran. Indikatornya adalah pelaporan

- disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku
5. Pertanggungjawaban, melakukan pertanggungjawaban dengan indikator menyusun dan menyajikan laporan keuangan
 6. Pengawasan, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator dalam pengawasan:
 - a. Pengawasan dilakukan oleh inspektorat yang berwenang dalam melakukan pengawasan kegiatan Pemda
 - b. Pengawasan dilakukan secara benar
 - c. Pengawasan diterapkan dengan baik dan tidak ada yang di istimewa.

Indikator yang digunakan tersebut berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Halim (2004).

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lingkungan pengendalian, menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui indikator:
 - a. Peningkatan integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang kondusif
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko, melakukan penilaian risiko yang terdiri atas indikator:
- a. Identifikasi risiko; dan
 - b. Analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian, kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Indikator kegiatan pengendalian terdiri atas:
- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
 - b. Pembinaan sumber daya manusia
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - d. Pengendalian fisik atas asset
 - e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
 - f. Pemisahan fungsi
 - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
 - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
 - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern; serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi, wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif. Indikator informasi dan komunikasi:
 - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Indikator yang digunakan tersebut berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pemilihan Test Statistik dan Pengujian Hasil Test Statistik *Statistik Deskriptif*

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2011:29).

Uji Validitas Data

Uji Validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sugiyono (2012), instrument yang valid adalah instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Peneliti menggunakan kuesioner didalam melakukan penelitian, maka kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin diukurnya.

Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total memakai rumus teknik korelasi Product Moment (Pearson Correlation).

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan

r = nilai korelasi

n = jumlah responden

X = skor nilai pertanyaan

Y = jumlah skor pertanyaan tiap responden

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan validitas, peneliti menggunakan ketentuan menurut Sugiyono (2007) dengan taraf kesalahan 5% dan $df=n-2$. Konstruk dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Teknik uji reliabilitas data dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.60 maka butir-butir pertanyaan pada masing-masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Rumusan *cronbach's alpha* menurut Husein Umar (2008) sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma \tau^2} \right)$$

Keterangan :

r_{11} reliabilitas instrument

K banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ jumlah barian butir

$\sigma \tau^2$ varian total

Spearman Rank

Kuat lemahnya suatu hubungan diantara kedua variabel diperoleh dari hasil perhitungan korelasi dengan *spearman rank correlation* tersebut.

$$rs = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan :

R_s koefisien korelasi spearman

$\sum d^2$ total kuadrat selisih antar ranking

N jumlah sampel penelitian

Kendall Tau

Korelasi Kendal Tau (τ) digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikansi antara dua variabel atau lebih bila datanya berskala ordinal dan untuk mengetahui terdapat hubungan atau tidak, dapat dilihat dari nilai signifikansi dan seberapa kuat hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau r . Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\tau = \frac{\sum A - \sum B}{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Dimana:

τ = Koefisien korelasi Kendal Tau yang besarnya ($-1 < \tau < 1$)

A = Jumlah rangking atas

B = Jumlah rangking bawah

N = Jumlah anggota sampel

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan kriteria dalam pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, diperoleh 6 Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Statistik disajikan dalam tabel descriptive *statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation
Skor_total_SPIP	6	90.25	11.152
Skor_total_efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	6	58.83	5.742
Valid N (listwise)	6		

Sumber: Output Pengolahan SPSS Vers. 23

Nilai rata-rata variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai Correlated Item Total Correlation. Nilai r hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai r hitung $>$ r tabel maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Pada penelitian ini diperoleh kedua variabel dinyatakan valid karena r hitung $>$ r tabel.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Teknik uji reliabilitas data dengan melihat nilai *croanbach's alpha*. Jika nilai *croanbach's alpha* lebih besar dari 0.60 maka butir-butir pertanyaan pada masing-masing variabel penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 2
Hasil Uji reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.982	23
Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	0.980	14

Sumber: Output Pengolahan SPSS Ver. 23

Dari hasil tabel di atas diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60, artinya bahwa tiap butir instrumen dapat dipercaya.

Hasil Korelasi Spearman Rank

Tabel 3
Uji Spearman Rank Correlation

		SPIP	Efektivitas	
Spearman's rho	SPIP	Correlation Coefficient	1.000	.816**
		Sig. (2-tailed)	.	.001
		N	6	6
Efektivitas		Correlation Coefficient	.816**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.
		N	6	6

Sumber: Output Pengolahan SPSS Ver. 23

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan SPSS Vers.23 diperoleh angka koefisien korelasi sebesar .816 (81.6%) dan tingkat signifikan .001 (1%), artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan berhungan positif dan memiliki hubungan yang signifikan. Jadi dapat diartikan semakin tinggi Pelaksanaan Pengendalian Internal maka semakin tinggi juga Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil Korelasi Kendall Tau

Tabel 4.
Uji Kendall Tau

Kendall's tau_b	SPIP	Correlation Coefficient	1.000	.702
		Sig. (2-tailed)	.	.004
		N	6	6
	Efektivitas	Correlation Coefficient	.702	1.000
		Sig. (2-tailed)	.004	.
		N	6	6

Sumber: Output Pengolahan SPSS Ver. 23

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS Vers.23, angka koefisien korelasi sebesar .702 (70.4%) dan tingkat signifikan .004 (4%), artinya tingkat kekuatan hubungan (korelasi) antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan berhubungan positif dan memiliki hubungan yang signifikan. jadi dapat diartikan semakin tinggi Pelaksanaan Pengendalian Internal maka semakin tinggi juga Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan pengujian korelasi *spearman rank* menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan yang berarah positif dan memiliki hubungan korelasi yang kuat sebesar 0.816, hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden pada kuesioner yang menjawab skor rata-rata tinggi dan skor tertinggi

adalah tentang lingkungan pengendalian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kuat, jadi ada hubungan positif yang signifikan antara Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belajar daerah pada pemerintah. Dari hasil pengujian *spearman rank* dan *kendall tau* yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi <0.05 yaitu 1% dan 4% serta tingkat korelasinya kuat. Jadi dapat diartikan semakin tinggi Pelaksanaan Pengendalian Internal maka semakin tinggi juga Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Analisis dimensi pelaksanaan pengendalian internal:

- a. Lingkungan Pengendalian, di Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai, pendelegasian dan tanggungjawab, kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM, peran aparat pengawasan yang efektif, dan hubungan kerja telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Kecuali Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan lingkungan pengendalian terkait dengan pendelegasian dan tanggungjawab dimana masih terdapat unsur pendistribusian tugas yang belum merata serta penerapan kebijakan terhadap pembinaan SDM (pegawai).
- b. Penilaian Risiko, bahwa Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sudah melakukan identifikasi risiko dan

- analisis risiko dengan baik terkecuali Pemerintah Kota Tasikmalaya yang penilaiannya sangat baik, dapat melakukan sidak atas jalannya setiap kegiatan instansi dalam mengelola keuangan daerah dengan membuat prosedur dan evaluasi risiko, didokumentasikan dan dilengkapi dengan saran dan rekomendasi. Serta penilaian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cukup baik dalam melaksanakan penilaian risiko dari identifikasi dan analisis risiko, dimana penilaian risiko yang paling lemah adalah dalam prosedur dan evaluasi dalam mengelolan keuangan daerah.
- c. Kegiatan Pengendalian, bahwa Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam melakukan kegiatan pengendalian seperti review kinerja instansi pemerintah, pembinaan SDM, pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas asset, penetapan dan review atas indikator ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi, pencatatan yang akurat, pembatasan akses, akuntabilitas dan dokumentasi sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik, sedangkan Pemerintah Kota Tasikmalaya berjalan dengan sangat baik dilihat dari pengendalian asset yang dilakukan, dan pengamanan dalam sistem informasi. Terkecuali Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dimana kegiatan pengendaliannya berkategori cukup baik dan didalam melakukan review kinerja Kabupaten Bandung Barat kurang baik, dimana tidak berjalannya secara peiriodik tentang pengukuran atau tolak ukur kinerja.
- d. Informasi dan Komunikasi, bahwa Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penyelenggaraan komunikasi atas informasi dilakukan secara efektif, serta sudah melakukan pengelolaan, pengembangan dan

pembaharuan sistem informasi yang baik, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan dan menyediakan sarana informasi dan komunikasi serta pengelolaan, pengembangan sistem informasi cukup berjalan baik, dimana adanya sarana informasi dan komunikasi yang memadai dalam pelaksanaan tugas para pegawai.

Dari ke 4 dimensi tersebut bisa dilihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal pemerintah di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Tasikmalaya dan kota Bandung berjalan dengan baik, Pemerintah Kota Tasikmalaya berjalan dengan sangat baik dan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjalan cukup baik.

Analisis terhadap dimensi efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah:

- a. Perencanaan, Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk kategori baik dan sangat baik (Kota Tasikmalaya). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam merencanakan penetapan tujuan, sasaran, hasil serta indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sudah berjalan dengan baik.
- b. Pelaksanaan, ke Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk kategori baik dan sangat baik (Kota Tasikmalaya). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran digunakan secara efektif, pengelolaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta tercapainya semua tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- c. Penatausahaan, Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk

- kategori baik dan sangat baik (Kab. Bandung dan Kota Tasikmalaya). Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia sudah tepat, pengelolaan anggaran yang sudah sesuai dan tepat, menyusun dan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran, dan mengikuti alur dalam alokasi anggaran.
- d. Pelaporan, Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk kategori baik dan sangat baik (Kab. Bandung dan Kota Tasikmalaya). Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan disusun sudah mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku di tahun 2015 berbasis akrual.
 - e. Pertanggungjawaban, Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk kategori baik dan sangat baik (Kab. Bandung dan Kota Tasikmalaya). Hal ini menunjukkan bahwa ke Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sudah melakukan pertanggungjawaban dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
 - f. Pengawasan, Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan termasuk kategori baik dan sangat baik (Kota Tasikmalaya dan Kota Bandung). Hal ini menunjukkan bahwa ke Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sudah melakukan pengawasan kegiatan pemerintah daerah, pengawasan dilakukan secara benar dan pengawasan sudah diterapkan dengan baik dan tidak ada yang diistimewakan.

Pengelolaan keuangan daerah akan terwujud dengan efektif apabila suatu organisasi pemerintah mampu menciptakan, menerapkan dan memelihara sistem pengendalian intern, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan suatu instansi, pengamanan negara serta meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat pemerintah daerah telah menerapkan pengendalian intern pemerintah dengan baik maka dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan dapat berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Joni Iskandar (2015), Mei Sari Simatupang (2017) dan Sinambow Gloria Injilita Bulan, Jantje Tinangon, Lidia Mawikere (2017) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

IMPLIKASI

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal berhubungan positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian pelaksanaan pengendalian internal yang relevan dan berjalan dengan baik dari dimensi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi menjadi komponen untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, yaitu implikasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan antara lain:

1. Dimensi atau komponen di dalam pengendalian internal atau sistem pengendalian intern yaitu dari mulai melakukan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi harus dijalankan dengan baik
2. Gaya kepemimpinan atau sumber daya manusia disetiap pemerintah yang harus diperhatikan karena sumber daya manusia merupakan komponen utama berhasil tidaknya suatu organisasi bisa mencapai tujuan organisasinya dengan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengendalian internal berhubungan positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Enam Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

Bagi Enam Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:

- a. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan ke enam Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menunjukkan:

1. Ada hal-hal yang harus diperhatikan khususnya di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait kegiatan pengendalian dimana pimpinan harus menetapkan tujuan secara keseluruhan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam rencana strategis dan kinerja tahunan. Juga harus melakukan pengamanan dalam pengelolaan sistem informasi dengan menggunakan password atau bisa dengan membatasi akses masuk sistem informasi. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah sistem informasi yang telah dikembangkan perlu diperbaharui terus menerus berdasarkan kebutuhan instansi.
2. Pimpinan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota di enam Provinsi Jawa Barat yang penulis teliti, diharapkan memegang komitmen dan integrasi yang tinggi untuk memanfaatkan secara maksimal berbagai informasi keuangan daerah dan melakukan pengawasan sesuai dengan tugas di setiap jabatan dalam inspektorat,
 - b. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel yang berpengaruh kuat terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti gaya kepemimpinan, dan komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, Rohman. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Afrizal, Muhammad Arfan dan Darwanis.2016. *Analitis Efektioitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Sabang*. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*.<http://www.bpk.go.id/>. Diakses 30 Maret 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*.<http://www.bpk.go.id/>. Diakses 10 April 2017.
- COSO, 2013.*Internal Control Integrated Framework : Executive Summary* Durham, North Carolina.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Joni Iskandar. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional*

Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian.....

Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Pekanbaru) .Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Lamusu, 2013.*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo.*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. lakip.bandung.go.id/. Diakses pada 10 April 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. lkip.tasikmalayakab.go.id/. Diakses pada 10 April 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2016. www.cimahikota.go.id/. Diakses pada 10 April 2017.

Mahmudi. 2007. *Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mei Sari Simatupang. 2017. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kota Padangsidempuan)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Susetyo, Budi. 2010. *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung : Refika Aditama..
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Siegel, Sidney. 1992. *Statistik Nonparametrik untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.
- Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.